

BAB V

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Corporate Governance* terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kuala Lumpur *Stock Exchange* (KLSE) tahun 2012-2014. Berdasarkan metode purposive sampling diperoleh 225 data sampel untuk Indonesia dan 489 data untuk Malaysia. Penelitian ini menggunakan indeks pengungkapan yang diterbitkan oleh *PriceWaterhouse (PWC)* sebanyak 65 item untuk Malaysia dan 107 item untuk Indonesia.

Berdasarkan analisis dan pengujian data dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia dan Malaysia.
2. Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia.
3. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Malaysia.
4. Komite audit berpengaruh negatif terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia.

5. Komite audit tidak berpengaruh terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia.
6. Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia dan Malaysia.
7. Terdapat perbedaan tingkat *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia dan Malaysia.
8. Terdapat perbedaan pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia dan Malaysia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat beberapa saran untuk perbaikan penelitian kedepannya sebagai berikut:

1. Menambah jumlah sampel penelitian dengan memanjangkan periode waktu penelitian agar hasil penelitian dapat lebih mencerminkan kondisi yang sesungguhnya.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel yang lebih luas, menambah beberapa proksi dari mekanisme *corporate governance* seperti komite-komite yang ada di dalam perusahaan, dapat pula mempertimbangkan pengukuran dari *good corporate governance index* atau *rating good corporate governance*.
3. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan *framework* item-item lain selain dari *PriceWaterhouse (PWC)* untuk mengukur *mandatory disclosure* dan

juga memperbarui acuan *framework* tersebut sehingga akan lebih sesuai dengan keadaan saat ini.

4. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa membandingkan dengan negara lain yang masih serumpun (studi komparatif).

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan penelitian yang dengan keterbatasan tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat *adjusted R²* dari model yang diuji dalam penelitian ini tergolong rendah, yaitu sebesar 17,8,% di Indonesia dan 2,4% di Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap *mandatory disclosure*.
2. *Good corporate governance* yang digunakan masih menggunakan tiga proksi yaitu dewan komisaris, komisaris independen dan komite audit.
3. Penelitian ini hanya menggunakan *framework* item-item dari *PriceWaterhouse* untuk mengukur *mandatory disclosure*.
4. Penelitian ini hanya membandingkan dua negara Indonesia dan Malaysia.